

ABSTRAK

Wiwi Sapitri “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat ”

Adanya otonomi daerah mengharuskan daerah mengelola, mengurus serta menggali potensi yang ada. Tak terkecuali dalam hal mengelola keuangan untuk memajukan dan membangun daerah kearah yang lebih baik. Dalam pengelolaan keuangannya, Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun berturut-turut sampai saat ini tahun 2016 mendapat opini WDP (Wajar Dengan Penegcualian) dari BPK yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2017, artinya dalam pelaksanaan mengelola keuangan masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga harus diperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan yang sama pada pengelolaan keuangan periode selanjutnya. Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat belum dapat meningkatkan kinerja keuangannya selama lima tahun berturut-turut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat pengaruh pengelolaan kuangan yang terdiri dari akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengendalian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan.

Metode dalam penelitian ini deskriptif asosiatif dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasinya adalah Pegawai Negeri Sipil bagian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 29 OPD yaitu 85 responden. Data yang digunakan adalah data primer dari responden yaitu kuesioner dengan analisis menggunakan SPSS. Untuk mendapatkan hasil menggunakan regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini tidak terdapat pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil perolehan uji parsial dengan nilai t hitung sebesar $-1,069 < t$ tabel $1,667$ dengan taraf signifikansi $0,288 > 0,05$ maka H1 ditolak. Terdapat pengaruh *value for money*(X2) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil perolehan dapat dilihat dari uji parsial dengan nilai t hitung sebesar $3,690 > t$ tabel $1,667$ dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H2 diterima. Tidak terdapat pengaruh kejujuran (X3) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil perolehan uji parsial dengan nilai t hitung sebesar $1,102 < t$ tabel $1,667$ dengan taraf signifikansi $0,274 > 0,05$ maka H3 ditolak. Tidak terdapat pengaruh transparansi (X4) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil perolehan uji parsial dengan nilai t hitung sebesar $0,684 < t$ tabel $1,667$ dengan taraf signifikansi $0,496 > 0,05$ maka H4 ditolak. Terdapat pengaruh pengendalian (X5) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil perolehan uji parsial dengan nilai t hitung sebesar $6,776 > t$ tabel $1,667$ dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H5 diterima. Hasil analisis pengujian regresi secara simultan dengan uji $-F$ menunjukkan nilai F hitung sebesar $37,670 >$

F tabel 2,33 dengan taraf signifikansi 5 % maka H₀ diterima, hal ini menunjukkan dimensi akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Nilai koefisien determinasi yaitu R² (*R Square*) sebesar 0,839 atau 70,3%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen yaitu pengelolaan keuangan (akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian) terhadap variabel dependen kinerja aparatur pemerintah daerah sebesar 70,3% sedangkan 29,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Kata Kunci : *Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan*

